

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelesaikan Penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafik, Jakarta, 2010.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pusaka Kartini, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001.
- Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006/

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005.

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, 2006.

Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pid.B/2023/PN.Psr.

C. Jurnal/Skripsi

Aldi Indra Tambuwun, "Sanksi Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Atas Sumpah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 242 Tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV No. 6, Juli 2016.

Ardellia Luckyta Putri Armunanto, “Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu dalam Proses Perkara Pidana”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Josua Hizkia Ratu, “Kedudukan Pengambilan Sumpah dan Keterangan Palsu Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X No. 9, Agustus 2021.

La Ode Bunga Ali dan Muh. Sutri Mansyah, dengan judul ”Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus *Obstruction of Justice*: Kajian Putusan Nomor 14/Pid/Tpk/2015/PT.DKI, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2019.

Natasya Vi Veronica, Baharudin, dan Indah Satria, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor: 66/Pid.B/2023/PN Kla)”, *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2024.

Nauli Marsusila Lubis dan Ridwan Arifin, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Saksi yang Memberikan Kesaksian Palsu di Bawah Sumpah Dalam Persidangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

D. Internet

KBBI, *Makna Manfaat*, <http://kbbi.web.id/manfaat>, Diakses Tanggal 07 Desember 2024.